BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia masih dihadapkan ketimpangan antarwilayah, perbedaan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*) pertama kali dikembangkan oleh Amartya Sen ke sekitar tahun 1980-an melalui pendekatan capability, menekankan bahwa indeks pembangunan manusia harus dilihat sebagai proses perluasan kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki standar hidup layak yaitu sebagai ukuran komprehensif pembangunan tidak hanya berfokus ke aspek ekonomi, tetapi juga kualitas manusia secara menyeluruh (Jannah et al., 2022).

Upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting karena menggambarkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Perubahan IPM tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro (Sastroatmodjo et al., 2023). Beberapa faktor sering dikaitkan dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia (Pasaribu et al., 2024).

Pengeluaran pemerintah, khususnya ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, berperan meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik merupakan komponen utama penyusun IPM (Pasaribu et al., 2024). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak sebagai dimensi pembentuk IPM (Litriani, 2021).

Faktor pertama yang memengaruhi IPM yaitu investasi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Peningkatan investasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif yang pada akhirnya membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Simamora, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi di Indonesia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi global, pandemi, dan kebijakan pemerintah.

Menurut teori investasi yang dikemukakan oleh Keynes tahun 1936 dalam Sari & Putra (2023) yang berkaitan dengan konsep *misallocation of investment* menjelasksan bahwa investasi dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia apabila tidak dialokasikan pada sektor yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi yang terkonsentrasi pada sektor padat modal atau sektor yang tidak berkaitan langsung dengan dimensi IPM menyebabkan manfaat investasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi, termasuk investasi pada pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Kartu Prakerja, serta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat sebagai komponen utama dalam peningkatan IPM (Prasetyo, 2025). Meskipun demikian, realisasi investasi di Indonesia masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Menariknya, kondisi tersebut tidak menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tetap menunjukkan tren kenaikan dari waktu ke waktu.

Perkembangan investasi di Indonesia tahun 2019-2025 mengalami fluktuasi, Pada tahun 2019 investasi Indonesia tercatat sebesar 33,78 juta USD. Tingginya investasi pada tahun ini didukung oleh kondisi ekonomi yang relatif stabil serta meningkatnya realisasi penanaman modal. Memasuki tahun 2020, investasi menurun menjadi 32,34 juta USD akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan menurunnya kepercayaan investor. Memasuki tahun 2021 investasi Indonesia tercatat sebesar 31,45 juta USD. Pada tahun ini, investasi Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, didorong oleh meningkatnya kepercayaan investor serta perbaikan kondisi ekonomi. Selain itu, kontribusi PMA dan PMDN relatif seimbang, serta terjadi penyebaran investasi yang lebih merata hingga ke luar Pulau Jawa (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022).

Tahun 2022 investasi Indonesia kembali menurun sebesar 29,74 juta USD, penyebabnya karena *Foreign Direct Investment* (FDI) global turun sekitar 12 % setelah mengalami *rebound* kuat pada 2021, terutama karena beragam krisis global yang terjadi bersamaan, seperti perang Rusia–Ukraina, harga pangan dan energi yang tinggi, serta tekanan utang dan ketidakpastian ekonomi dunia yang membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya *(United Nations Conference on Trade and Development*, 2023).

Pada tahun 2023 investasi mulai menunjukkan pemulihan sebesar 30,34 juta USD yang didorong oleh stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, serta pengembangan sektor prioritas seperti hilirisasi industri. Pada tahun 2024 investasi terus mengalami peningkatan sebesar juta 31,39 USD yaitu pada tahun tersebut didukung oleh sektor unggulan seperti industri logam dasar, pertambangan, dan kebijakan hilirisasi yang konsisten juga menjadi faktor utama dalam menarik investor karena mampu meningkatkan nilai tambah dan menciptakan peluang usaha baru sehingga mencerminkan adanya perbaikan kondisi investasi setelah penurunan pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2025 investasi mengalami penurunan drastis sebesar 25,43 juta USD terjadi akibat kombinasi faktor global dan domestik, seperti ketidakpastian ekonomi dunia, tingginya suku bunga, terbatasnya likuiditas global, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan investor lebih berhati-hati sehingga sebagian proyek investasi ditunda atau dikurangi (*United Nations Conference on Trade and Development*, 2025).

Fenomena menarik adanya beberapa periode investasi menunjukkan kecenderungan berlawanan arah yaitu memengaruhi secara negatif terhadap IPM. Pada periode 2021 ke 2022, investasi mengalami penurunan dari sekitar 31,45 juta USD menjadi 29,74 juta USD, sementara IPM justru meningkat dari 72,29 persen menjadi 72,91 persen. Pola ini menunjukkan indikasi hubungan negatif, di mana penurunan investasi tidak diikuti penurunan IPM, melainkan sebaliknya. Hal serupa juga terjadi pada 2023 ke 2025, ketika investasi kembali menurun cukup signifikan dari 30,34 juta USD menjadi 25,43 juta USD, namun IPM justru meningkat tajam dari 73,55 persen menjadi 75,90 persen.

Fenomena ini tidak semata-mata mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah, melainkan menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan investasi sebagai salah satu faktor yang mendorong pembangunan ekonomi. Peningkatan IPM di tengah penurunan investasi mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas hidup cenderung ditopang oleh belanja pemerintah dan program jangka pendek. Selain itu, penurunan investasi membatasi penciptaan lapangan kerja dan berisiko meningkatkan pengangguran, khususnya pada tenaga kerja terdidik, sehingga peningkatan IPM belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya inefisiensi alokasi sumber daya, karena peningkatan IPM tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, fenomena ini perlu diwaspadai sebagai indikasi bahwa peningkatan IPM belum didukung secara optimal oleh faktor-faktor ekonomi yang berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai keberhasilan pembangunan (Williyan & Hasmarini, 2024).

Faktor lain yang memengaruhi IPM adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan IPM (Renaldi & Agustina, 2024). Menurut teori Adolf Wagner dalam Ridwan & Nawir (2021) pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pengeluaran pemerintah seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Pengeluaran ini mencakup belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan program sosial lainnya (Ridwan & Nawir, 2021).

Pengeluaran pemerintah dari tahun 2019-2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuasi. Pada tahun 2019, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 98,58 juta USD, yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik. Memasuki tahun 2020, pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 102,26 juta USD akibat peningkatan belanja negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Memasuki tahun 2021, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 109,72 juta USD. Pada tahun ini adanya peningkatan belanja negara untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, sehingga pemerintah memperbesar alokasi anggaran dibandingkan tahun-tahun normal. Pada tahun 2022 dalam 5 tahun terakhir jadi tahun dengan tingkat pengeluaran pemerintah

terendah sebesar 101,43 juta USD. Penurunan ini terutama disebabkan oleh mulai terkendalinya situasi pandemi sehingga tekanan pada belanja kesehatan darurat dan program perlindungan sosial sedikit berkurang, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian pengeluaran setelah periode stimulus besar (Kementerian Keuangan, 2022).

Memasuki tahun 2023 hingga 2025, pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan berturut-turut dari 102,22 juta USD pada tahun 2023 menjadi 107,95 juta USD pada tahun 2024 dan mencapai 111,26 juta USD pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan anggaran difokuskan pada program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan IPM. Pada tahun 2023–2024, pengeluaran pemerintah direalisasikan melalui berbagai program seperti PKH, KIP, KIS serta berbagai bantuan sosial lainnya. Di tahun 2025 mulai dijalankan beberapa program baru yang melibatkan anggaran besar yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG), serta Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM. Fokus belanja ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat, sehingga kontribusinya terhadap IPM semakin nyata (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Fenomena menarik terjadi pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, pengeluaran pemerintah tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 109,72 juta USD pada tahun 2021 menjadi 101,43 juta USD pada tahun 2022. Namun demikian, pada periode yang sama IPM justru mengalami peningkatan dari 72,29 persen menjadi 72,91 persen. Kondisi ini

menunjukkan bahwa penurunan pengeluaran pemerintah tidak diikuti oleh penurunan IPM, sehingga mencerminkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara kedua variabel tersebut.

Fenomena tersebut tentu saja tidak sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah dipaparkan, di mana secara umum peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu mendorong peningkatan IPM. Namun demikian, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa fenomena ini tidak semata-mata mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah, melainkan dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam struktur pengeluaran. Penurunan pengeluaran pemerintah yang diikuti oleh peningkatan IPM mengisyaratkan adanya *lag effect*, yaitu dampak kebijakan pemerintah pada periode sebelumnya yang baru dirasakan pada periode saat ini (Agustina & Renaldi, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dengan variabel yang sama yaitu penelitian pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap IPM yang diteliti oleh Hasibuan & Syahbudi (2022), Damanik et al., (2022) dan Akinyele et al., (2025), dan untuk pengaruh negatifnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslihatinningsih et al., (2023), Anantika & Sasana (2020) dan Fadly & Edward (2023).

Faktor yang memengaruhi IPM selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, ketika ekonomi tumbuh, akses terhadap layanan publik membaik, lapangan kerja meningkat, standar hidup naik dan kualitas hidup manusia membaik sehingga IPM ikut terdorong naik (Efendi et al., 2024). Menurut Simon Kuznets tahun 1973, dalam Efendi et al., (2024) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan

kapasitas perekonomian suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi pada umunya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan IPM karena pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang akan meningkatkan nilai IPM (Irawan & Akbar, 2022). Secara garis besar, perekonomian Indonesia pada 2021–2025 sempat tertekan akibat pandemi COVID-19, lalu berangsur pulih dan kembali stabil dengan pertumbuhan yang konsisten.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019–2025 berfluktuasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen, didukung oleh stabilitas ekonomi domestik, konsumsi rumah tangga, dan investasi yang masih terjaga. Memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi -2,07 persen akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, dan investasi. Memasuki tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 3,70 persen. Pada tahun ini perekonomian Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi, konsumsi, serta meningkatnya pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2025).

Memasuki tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,31 persen karena pemulihan ekonomi semakin kuat. Pada tahun 2023 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat melemahnya permintaan global, perlambatan perdagangan internasional, serta ketidakpastian ekonomi dunia yang memengaruhi kinerja ekspor dan investasi. Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan sebesar 5,11 persen meskipun tekanan ekonomi global masih terjadi, yang menandakan daya tahan ekonomi nasional semakin baik. (Badan Pusat Statistik, 2025).

Fenomena terjadi pada tahun 2023 menunjukkan dinamika yang menarik secara negatif antara pertumbuhan ekonomi dan IPM. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,31 persen menjadi 5,05 persen, namun IPM justru meningkat dari 72,91 persen menjadi 73,55 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak selalu berjalan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini tentu tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan IPM di tengah penurunan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hidup tidak selalu bergantung pada kinerja ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan sosial dan peningkatan akses layanan dasar. Di sisi lain, kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata,

sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat. Akibatnya, perubahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung tercermin pada peningkatan IPM. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami sebagai sinyal adanya ketimpangan distribusi hasil pembangunan, bukan semata-mata sebagai keberhasilan peningkatan kesejahteraan (Putri & Rachmawati, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dengan variabel yang sama yaitu penelitian pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM yang diteliti oleh Nurvita et al., (2022), Muhamad & Rahmi (2023) dan Putri et al., (2022). Beberapa penelitian juga memperoleh hasil sebaliknya yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM seperti penelitian Nainggolan et al., (2021), Asmara et al., (2024) dan Mauludin & Dewi (2020).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tidak selalu sejalan dengan pergerakan investasi, pengeluaran pemerintah, maupun pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, ketiga variabel tersebut seharusnya mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa ketika investasi mengalami penurunan, IPM justru meningkat. Fenomena serupa juga terjadi pada pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, sementara IPM terus menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara investasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan IPM tidak selalu bersifat linear sebagaimana yang dijelaskan dalam teori ekonomi pembangunan.

Selain itu, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menemukan bahwa investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel terhadap IPM masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan uraian dan beberapa fenomena yang telah dipaparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dalam pengembangan penelitian ini:

a. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara akademik terkait bagaimana pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan kajian ilmiah yang berkaitan dengan pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan

ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, serta upaya dan solusi supaya indeks pembangunan manusia terus membaik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut adalah beberapa manfaat praktis dalam pengembangan penelitian ini:

a. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan dan strategi terkait dengan investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi serta pengaruhnya terhadap kualitas pembangunan manusia.
b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia.
c. Bagi instansi/lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah serta instansi terkait dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
d. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan, serta menambah wawasan mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik yang diteliti.